

*Orasi Kaul Perempuan*

**MENGEDEPANKAN ETIKA  
KEPEMIMPINAN POLITIK UNTUK  
MENYELAMATKAN KEHIDUPAN DAN  
MEMPERBAIKI DEMOKRASI**



**Orasi Sekjen KPI  
Dian Kartikasari**

**Mengedepankan Etika Kepemimpinan Politik  
untuk Menyelamatkan Kehidupan dan  
Memperbaiki Demokrasi**

**MENGEDEPANKAN ETIKA KEPEMIMPINAN POLITIK  
UNTUK  
MENYELAMATKAN KEHIDUPAN DAN MEMPERBAIKI  
DEMOKRASI**

**Hadirin yang terhormat,**

**Salam Untuk Keadilan dan Demokrasi**

Merupakan kehormatan bagi saya, berada diantara hadirin sekalian untuk menyampaikan Orasi Politik ini dalam perhelatan Kaul Politik Perempuan, yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ini.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk memulai babak baru tatanan dan kehidupan politik di negeri ini, yaitu tatanan kehidupan politik yang: **Mengedepankan Etika Kepemimpinan Politik, untuk menyelamatkan kehidupan dan memperbaiki kehidupan.** Gagasan ini lahir sebagai buah dari refleksi

atau perenungan setelah mencermati gegap gempitanya proses demokratisasi, dinamika politik serta sikap dan perilaku pemimpin-pemimpin politik negeri ini, dalam 10 tahun terakhir ini.

Ketika semangat reformasi mulai surut pada usianya mencapai lima tahun, politik di Indonesia, secara perlahan tetapi pasti mulai berubah wajah. Politik yang awalnya dihidupi oleh semangat reformasi untuk mengakhiri tirani kekuasaan yang menindas, mengakhiri ketimpangan dan ketidakadilan yang menghimpit masyarakat, mengembalikan hak-hak rakyat yang telah terampas serta memulihkan korban-korban ketidakadilan, berubah menjadi sebuah industri politik yang mengubah watak kepemimpinan politik dan semua faktor yang ada di dalamnya, serta menciptakan ketidakadilan dan penindasan-penindasan baru, dimana anak-anak dan perempuan menjadi korban terbanyak.

#### **Hadirin yang terhormat,**

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, kita melihat, merasakan dan bahkan menjadi korban dari berbagai kebijakan, tindakan dan tingkah laku pemimpin-pemimpin politik kita, di tingkat pusat, tingkat daerah dan bahkan di tingkat desa. Kita membaca di berbagai media, beberapa kepala desa diperiksa polisi, karena meraub keuntungan puluhan juta dari penjualan beras yang seharusnya dibagikan kepada warganya yang miskin. Seorang kepala desa di Kalimantan Timur, menjual mata air yang ada di desanya kepada seorang pengusaha. Padahal mata air itu, satu-satunya sumber yang menjadi tumpuan warga disekitarnya. Hilangnya mata air itu, mengakibatkan setiap keluarga harus mengeluarkan uang Rp. 800 ribu per bulan untuk memenuhi kebutuhan air dalam rumah

tangganya. Kita juga melihat sejumlah peraturan daerah, yang dibuat oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diterbitkan untuk mengekang perempuan, melarang perempuan keluar malam atau mewajibkan perempuan memakai baju muslim, untuk mencegah pelacuran dan kemaksiatan. Kita juga menjadi saksi, beberapa Kepala Daerah mengeluarkan surat keputusan melarang agama tertentu menjalankan ibadahnya di wilayah kekuasaannya. Di Aceh, seorang kepala Daerah membuat surat himbauan melarang perempuan membonceng dengan duduk mengangkang. Di tempat lain, kepala daerah melegalkan tes keperawanan bagi siswi yang akan masuk jenjang sekolah. Kita juga mengetahui, sejumlah undang-undang dibuat bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu menguasai sumber daya di Indonesia dan membuat aturan yang melegakan negara untuk melepaskan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak rakyat, menyelenggarakan layanan publik dan melindungi tanah air serta warga negara di atasnya. Kita semua merasakan betapa kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah membuat sebagian saudara-saudara kita dalam waktu sekejap jatuh miskin. Kita semua juga merasakan, betapa sulitnya dan beratnya beban mengatur keuangan rumah tangga kita, karena harga sembako terus meroket, jauh meninggalkan kemampuan daya beli kita, sebagai orang biasa yang berpendapatan pas-pasan. Semua ini menunjukkan betapa besar kekuasaan pemimpin-pemimpin politik di negeri ini untuk membuat hukum dan kebijakan, yang mempengaruhi secara langsung atau pun tidak, pada kehidupan sehari-hari kita. Dan tanpa perlu mendalil atau berteori, pengalaman keseharian kita membuktikan, betapa buruk akibat yang ditimbulkannya, bila kekuasaan membuat hukum itu dilakukan tanpa etika.

Dalam sepuluh terakhir ini, dihadapan kita dipertontonkan tindak-tanduk, tutur kata dan tingkah pola Pemimpin-pemimpin kita, yang dengan sangat mudah nalar kita sebagai orang awam menilainya sebagai sesuatu yang tidak pantas dan menyalahi kepatutan umum. Seorang Bupati, menikahi anak perempuan di bawah umur, dan empat hari kemudian mengembalikannya pada keluarganya dengan alasan sudah tidak perawan. Daftar hadir Rapat anggota dewan yang selalu penuh, tetapi ruang sidangnya kosong, atau hanya sedikit sekali yang hadir. Beberapa diantara mereka memang hadir dalam sidang itu. Tetapi kehadiran mereka hanya secara fisik. Mereka hadir di dalam ruangan sidang itu, tetapi mereka tidak menjadi bagian dari proses sidang yang tengah berjalan. Ada yang tidur, ada yang sibuk dengan handphonenya menjawab sms, twitter, atau bbm, bahkan ada yang sembunyi-sembunyi sibuk dengan *ipadnya* menikmati situs porno. Ada pula yang hanya sambil lalu saja mendengarkan pimpinan sidang bicara, sambil menikmati hidangan dan ngobrol sana-sini dengan sesama anggota dewan, layaknya menonton film layar tancap di lapangan. Kita juga prihatin dengan pemimpin yang tidak hadir sepenuhnya di tengah penderitaan rakyatnya. Di tengah-tengah penderitaan pengungsi korban bencana yang berlindung di bawah tenda-tenda rapuh, yang menghampar luas di lapangan, sang pemimpin datang menyapa rakyatnya, berbasa-basi sebentar, lalu mengungkapkan keprihatinan sambil menuturkan kata-kata yang menenangkan. Hanya beberapa saat. Setelah itu, masuk ke tendanya, yang tentu saja berbeda dari tenda yang digunakan oleh para korban, lalu sambil memetik dawai-dawai gitar dia bernyanyi. Di tengah berita kelaparan, isteri yang membawa anak-anak balitanya bunuh diri karena kemiskinan, anak-anak usia sekolah dasar bunuh diri karena tidak bisa membayar pungutan sekolah, ledakan kompor gas di dapur-

dapur keluarga miskin, buruh migrant yang teraniaya dan terancam hukuman mati, pada saat yang sama kita juga disuguhi berita tentang pesta peluncuran album berisi lagu-lagu karya sang pemimpin. Saya tidak mengatakan bahwa membuat lagu dan menerbitkan album itu salah. Sama sekali tidak. Tidak ada yang salahnya, orang berkesenian. Bahkan orang harus menghargai dan mengembangkan seni, untuk memperkaya khasanah budaya kita. Juga untuk menghaluskan budi dan menajamkan rasa. Seperti petuah Ki Hajar Dewantara, yang mengajarkan bahwa seni mampu menghaluskan budi. Kesalahannya, terletak pada: tidak tepatnya saat, meluncurkan album. Dimana disaat-saat terjadi krisis dan kegentingan, rakyat menanti dan membutuhkan hadirnya kepemimpinan untuk menyelesaikan masalah.

#### **Hadirin yang terhormat,**

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, telinga kita seringkali menjadi merah dan hati kita mendidih, karena tutur kata pemimpin-pemimpin kita yang melampaui batas kepatutan umum. Tutur kata dan kelakar yang menyalahkan kebodohan buruh migrant dan menganggap layak mereka mengalami kekerasan karena kebodohnya, sesungguhnya tutur kata yang tak pantas untuk diucapkan siapa pun. Apalagi pemimpin. Tutur kata yang mengingkari kelaparan di tanah Yahukimo oleh seorang menteri, padahal senyatanya kelaparan itu ada, adalah hal yang melukai rasa keadilan kita.

Berbagai persoalan kemanusiaan dan keadilan di negeri ini tidak terselesaikan, bahkan terasa nyata telah terjadi pembiaran, seperti: Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi, pemiskinan, pelanggaran HAM masa lalu yang tak terselesaikan, penggusuran, pengusiran paksa, perampasan sumber kehidupan rakyat, penghancuran tempat tinggal, premanisme, perdagangan manusia, konflik berbasis keagamaan,

Kematian Balita karena kekurangan air bersih, kekerasan terhadap perempuan...dan masih banyak lagi. Keadaan ini membuat banyak orang berpikir dan menyimpulkan, bahwa di negeri ini sudah tidak ada kepemimpinan. Tidak ada leadership, begitu kata orang-orang pintar.

Namun saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Saya melihat sangat banyak pemimpin di negeri ini, di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagian besar dari mereka, sangat pandai, dari cara bicaranya dan cara berargumentasi dalam diskusi atau debat, sungguh meyakinkan kita semua bahwa pemimpin-pemimpin kita sangat pandai. Tetapi, dari sekian banyak pemimpin di negeri ini, sangat sedikit yang memegang teguh Etika Kepemimpinan. Ketiadaan etika kepemimpinan inilah yang mengakibatkan berbagai persoalan kemanusiaan, persoalan keadilan dan demokrasi, tak kunjung selesai. Bahkan semakin memburuk. Kenyataan ini membuat saya semakin yakin, bahwa mengedepankan Etika Kepemimpinan Politik, menjadi suatu hal yang sangat mendesak. Sangat urgent.

#### **Hadirin yang terhormat,**

Mungkin hadirin sekalian bertanya, mengapa mengedepankan Etika Kepemimpinan Politik? Mengapa kita tidak mengedepankan hukum. Bukankah selama ini semua orang berbicara bahwa negara kita adalah negara hukum. Dan Supremasi Hukum harus ditegakkan ? jawabnya, karena tidak semua keputusan, tindakan dan tingkah laku pemimpin yang menyalahi etika, merupakan peristiwa hukum. Sehingga hukum tidak mampu menjangkau mereka. Sebagai seorang yang sedikit belajar hukum, saya juga melihat bahwa kita tidak dapat menyandarkan pada Hukum. Kendati hakikat hukum adalah etika,

yang dilengkapi dengan kekuatan memaksa dan memberi sanksi kepada setiap pelanggarnya, namun hukum memiliki kelemahan fundamental untuk mengatasi carut marut yang terjadi karena ketiadaan etika dalam kepemimpinan politik saat ini. **Pertama**, hukum dibelenggu oleh asas legalitas. Yaitu suatu ketentuan yang menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dihukum atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pada satu sisi, ketentuan ini memang baik untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan memenjarakan orang secara sewenang-wenang. Tetapi dengan azas ini pula yang menyebabkan seorang kepala daerah yang menikahi anak dibawah umur dan mengembalikannya kepada orang tuanya, empat hari setelah pernikahannya, dengan alasan anak tersebut sudah tidak perawan saat dinikahi, menjadi tak terjamah oleh hukum. **Kedua** hukum hanya akan ditegakkan dan mewujudkan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan, bila penegak didalam penegakkan hukum, dilakukan oleh lembaga dan aparat penegakkan hukum yang bersifat mandiri dan bersih. Sayangnya, sampai hari ini lembaga dan aparat penegak hukum, belum seluruhnya dan sepenuhnya mandiri dan bersih. **Ketiga**, proses hukum yang rumit, dan berkepanjangan, seringkali mengakibatkan orang enggan berurusan dengan hukum. Dan terakhir, keempat, hukum merupakan produk politik yang sarat kepentingan dari pemimpin-pemimpin politik pembuatnya. Tentu sudah dapat dibayangkan, seperti apakah wujud hukum yang lahir dari kepemimpinan politik yang tidak beretika. Hukum tak ubahnya sebagai alat untuk melegalkan kekuasaan dan memuaskan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Kehilangan hakikatnya untuk menegakkan nilai keadilan dan kebenaran. Karena kelemahan fundamental yang dikandung oleh hukum itulah, maka saya memilih

mengajak semua pihak mengedepankan etika kepemimpinan politik, terlebih dahulu daripada mendorong supremasi hukum. Sebab supremasi hukum, yang bertumpu pada keadilan dan kebenaran hanya akan terwujud, bila hukum-hukum tersebut diciptakan oleh pemimpin-pemimpin yang mengedepankan etika.

### **Hadirin yang terhormat**

Etika Kepemimpinan politik, seharusnya menjadi panduan dan rambu-rambu bagi setiap pemimpin. Karena etika, mengajarkan tentang keutamaan, seperti keadilan, belas kasih, bela rasa (empati), kejujuran, kemurahan dan kerendahan hati. Etika juga mengandung nilai-nilai moral yang menjadi panduan kita menjalani hidup. Yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang benar dan tidak benar, apa yang patut dan tidak patut dan apa yang baik, benar dan patut. Etika, juga memberikan batasan, prinsip-prinsip sebagai pedoman untuk menghasilkan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi kemanusiaan dan kehidupan.

Pemimpin politik adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan bagi hajat hidup orang banyak. Memberikan kekuasaan kepada pemimpin yang tidak beretika, ibarat menyerahkan senjata api kepada balita (bayi di bawah usia lima tahun) yang bisa membahayakan keselamatan bagi banyak orang dan keselamatan balita itu sendiri. Kepemimpinan Politik tanpa etika akan melahirkan kediktatoran dan menghancurkan demokrasi, menebarkan ketidakadilan dan melanggengkan kesengsaraan umat manusia.

### **Hadirin yang terhormat,**

Sesungguhnya, dalam demokrasi yang sedang bertumbuh ini, dibutuhkan panduan bagi pemimpin-pemimpin politik kita, untuk

memperkaya dan memperdalam pengetahuan mereka tentang Etika kepemimpinan politik. Uluran tangan pakar etika dan sumbangsih perguruan tinggi dibidang filsafat, yang membidangi tentang ilmu etika, sangat dinantikan. Sayangnya, hingga saat ini penantian kita, masih belum terjawab.

Tetapi kita tidak bisa menunggu lagi terlalu lama. Jika pemerintahan ini diibaratkan sebuah taxi, argo terus berjalan. Semakin jauh kita tersesat, semakin mahal ongkos yang harus kita bayar.

Karena negeri ini, sebentar lagi akan berada dalam tanggungan dan pengurusan pemimpin-pemimpin baru. Semakin lama kita terperangkap dalam kekuasaan pemimpin tanpa etika, semakin mahal ongkos sosial politik yang harus kita tanggung.

Kita baru saja mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada 9 April 2014 yang lalu. Sebentar lagi, tepatnya pada 9 Juli 2014, kita juga akan melaksanakan pemilihan presiden/wakil presiden. Beberapa bulan sebelum pelaksanaan pemilu anggota dewan, sejumlah daerah baru saja menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Demikianlah proses rekrutmen jabatan-jabatan politik yang harus kita lalui, sebagai sebuah negara yang menyatakan diri menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan.

Pemilu merupakan wujud dari pengakuan dan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Namun pada saat yang sama, pemilu telah berkembang menjadi sebuah industri politik yang menggurita. Melahirkan sejumlah tawaran dan permintaan (*supply and demand*) terhadap sejumlah barang dan jasa. Dalam masa pemilu itu, permintaan terhadap sejumlah barang mulai kartu nama, sticker, pin, baliho iklan politik, yang digunakan oleh individu-individu dan partai

politik peserta pemilu, hingga perlengkapan pelaksanaan pemilu seperti surat suara, kotak dan bilik suara hingga tinta penanda telah menggunakan hak pilih, meningkat tajam. Pemilu juga menciptakan profesi dan jasa-jasa baru yang menjanjikan keuntungan besar seperti: jasa survey electabilitas, konsultan pemenangan, tim sukses, juru kampanye dan konsultan komunikasi politik. Sejumlah media televisi pun rela mengeluarkan dana untuk bekerja sama dengan lembaga jasa hitung cepat (*quick account*), demi menggaet iklan dan perhatian pemirsanya. Hukum pasar bebas pun berlaku dalam sistem pemilu<sup>1</sup>. Siapa paling memiliki sumber daya untuk memproduksi alat kampanye dan memanfaatkan jasa industri elektoral serta paling mampu meyakinkan pemilih, merekalah yang akan menang. Proses politik berbiaya mahal ini, sudah mengandung potensi pelanggaran etika dan bahkan pelanggaran hukum. Tipu muslihat, kecurangan, *money politics*, hasutan, ancaman dan tekanan, dalam proses pemilu, sampai hari ini masih menjadi perbincangan diantara kita. Pemimpin yang lahir dari cara-cara kotor ini, sangat mungkin akan menjadi pemimpin politik yang tidak beretika. Karenanya, kita semua wajib menjadi warga negara yang aktif untuk mengontrol dan mendorong pemimpin-pemimpin kita, agar menjadi pemimpin politik yang mengedepankan Etika Kepemimpinan Politik.

Untuk dapat menjadi warga negara yang aktif berperan mengontrol pemimpin-pemimpin kita, maka kita perlu melengkapi diri kita sendiri dengan pengetahuan tentang Etika Kepemimpinan Politik.

### **Hadirin yang terhormat,**

<sup>1</sup> Pasar Bebas adalah suatu keadaan dimana seluruh keputusan dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang dan jasa ditentukan sendiri oleh para pihak secara bebas, tanpa ada campur tangan atau hambatan pihak lain. Sistem pasar bebas, mengandaikan semua orang memiliki daya yang sama.

Sekurang-kurangnya ada 5 (lima) hal mendasar yang menjadi bagian dari Ektika Kepemimpinan Politik. Yaitu Nilai (*value*), Visi (*vision*), Suara (*Voice*), Keutamaan (*Virtue*) dan Hasil (*Result*). Untuk memudahkan, saya biasanya menyebutnya dengan V4R (*Value, Vision, Voice, Virtue & Result*)

**Value (Nilai)** adalah pemahaman dan komitmen Pemimpin terhadap nilai-nilai yang berlaku secara universal yang mencerminkan keadilan seperti Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Tidak membedakan (Non Diskriminasi)- mengakui bahwa setiap orang sama, tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial dan ekonomi, anti terhadap setiap bentuk Kekerasan, Keterbukaan, keadilan, kejujuran. Nilai keadilan, termasuk didalamnya mengakui kenyataan bahwa diantara masyarakat, ada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, rentan dan berkebutuhan khusus, yang tidak mungkin dipaksakan untuk bersaing secara bebas dengan kelompok-kelompok yang beruntung, karenanya mereka yang kurang beruntung ini perlu dan berhak atas perlakuan khusus. Nilai-nilai ini dilekatkan sebagai nilai pribadi pemimpin dan menjadi landasan dalam setiap pilihan keputusan yang diambilnya, baik keputusan bagi pribadinya maupun keputusan bagi masyarakat.

**Vision (Visi)** adalah kemampuan pemimpin membingkai harapan dan gambaran nyata yang seharusnya kita wujudkan, sesuai nilai-nilai yang menjadi komitmen pemimpin dan meyakinkan orang-orang yang dipimpin untuk bersama-sama mewujudkan visi tersebut, seperti kesejahteraan, kebahagiaan, kebaikan, perdamaian dan keberagaman dan kebersamaan.

**Voice (suara)** adalah tindakan pemimpin menyuarkan visi dan



pemenuhan hak orang-orang yang dipimpin, pembelaan terhadap orang-orang yang lemah dan tak berdaya, memotivasi orang lain dengan cara yang otentik untuk bertindak sesuai nilai-nilai yang berlaku secara universal. Pemimpin juga harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap orang untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhannya, sebagai aspirasi rakyat, lalu memperjuangkan aspirasi tersebut dalam ruang-ruang pengambilan keputusan yang telah dipercayakan kepada pemimpin itu. Suara ini juga mencerminkan kemampuan pemimpin politik mempengaruhi proses dan isi suatu kebijakan publik agar berpihak kepada masyarakat, dan mencapai visi yang telah dirumuskan.

**Virtue (Keutamaan)** adalah upaya pemimpin untuk secara terus menerus memupuk kebajikan dan mempraktekkan sifat dan tindakan keutamaan, seperti belas kasih, kemurahan hati, empati, sopan santun, keadilan masyarakat, manfaat yang baik. Seorang pemimpin harus menghormati hak setiap orang untuk hidup dan bermartabat. Ia juga harus terus menerus berusaha dan menjaga dan menempatkan diri untuk berpikir, berbuat, dan berbicara baik dan benar, dan tanggap terhadap kepatutan dan kepantasan umum.

**Result (Hasil)** adalah apa yang dihasilkan oleh kepemimpinan, baik berupa tindakan, kata-kata, dan keputusan politik untuk public memberikan manfaat dan daya bagi masyarakat untuk mewujudkan perubahan nyata mencapai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan sehingga menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi seluruh masyarakat secara inklusif.

**Hadirin yang terhormat,**

Mengakhiri tuturan saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan memahami elemen-elemen penting dari Etika Kepemimpinan Politik ini, kita dapat mengoreksi kesalahan dan pelanggaran etika pemimpin-pemimpin kita. Sebagai manusia dan sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan keberlanjutan bangsa serta menegakkan demokrasi, kita menjadi penentu untuk mendorong Pemimpin-pemimpin kita, agar mengedepankan Etika Kepemimpinan Politik

Mari.... kita mulai dari sekarang. Sebelum semuanya menjadi terlambat

Salam untuk Keadilan dan Demokrasi

Jakarta, 24 April 2014

**Dian Kartika Sari**

